

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memungkinkan percepatan pembangunan, karena daerah diberi kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Masing-masing daerah otonom diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang diatur dengan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengawasi dan mengatur kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Mardiasmo, 2009).

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan dilakukan terhadap APBD yang

dilakukan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah alat untuk pengendalian juga evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit - unit kerja di dalamnya (Mahmudi, 2010). Fungsi laporan keuangan yaitu untuk memberi informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi masih banyak pihak yang belum memahami 3 ketika membaca laporan keuangan. Hal itu dikatakan wajar, mengingat berbagai pihak tersebut asalnya dari latar belakang yang berbeda-beda. Padahal besar kemungkinan mereka sangatlah membutuhkan informasi keuangan tersebut sebagai bahan pembuatan keputusan, maka dari itu dibutuhkan analisis laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca LRA menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca dan laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat

stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. (Mahmudi 2010: 135).

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (publik fund) melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Kaeran sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengewasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan. (Mahmudi 2010: 155).

Analisis belanja daerah sngat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien

dan efektif (*value for money*). Se jauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kupang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam Perumusan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan,

Pelaksanaan administrasi dinas 4 di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Disamping itu juga dalam melakukan program dan kegiatannya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang membutuhkan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam hal ini pendapatan dan belanja. Pendapatan terbagi atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain Lain PAD yang sah. Sedangkan belanja daerah terbagi atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Sebagai data awal penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan Laporan Realisasi Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang pada tabel 1.1 sebagai berikut

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kupang

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2018	Belanja Daerah	5.820.893.100	5.501.665.902	(319.227.198)
	Belanja Operasi	1.356.147.500	1.223.175.700	(132.971.800)
	Belanja Modal	4.464.745.600	4.278.490.202	(186.255.398)
2019	Belanja Daerah	5.967.689.000	5.470.928.700	(496.760.300)
	Belanja Operasi	1.340.064.500	1.224.092.700	(115.971.800)
	Belanja Modal	4.627.624.500	4.246.836.000	(380.788.500)
2020	Belanja Daerah	1.034.336.000	959.786.050	(74.549.950)

	Belanja Operasi	1.008.371.500	933.821.550	(74.549.950)
	Belanja Modal	25.964.500	25.964.500	0
2021	Belanja Daerah	6.577.351.117	6.051.530.538	(525.820.579)
	Belanja Operasi	6.529.498.517	6.003.677.938	(525.820.579)
	Belanja Modal	47.852.600	47.852.600	0
2022	Belanja Daerah	8.169.834.770	7.616.965.299	(552.869.471)
	Belanja Operasi	8.169.834.770	7.616.965.299	(552.869.471)
	Belanja Modal	0	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada tabel 1.1 di atas, secara umum realisasi anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang tidak sesuai dengan anggarannya.

Diketahui bahwa realisasi anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang tahun 2018-2022 ditinjau dari aspek belanja cenderung mengalami peningkatan anggaran setiap tahunnya.

Terjadinya selisih anggaran antara realisasi dengan anggaran pada tahun 2018 sampai dengan 2022, yang paling besar selisihnya adalah pada tahun 2022 yakni pada pos belanja operasi dengan selisih anggarannya sebesar Rp 552.869.471. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaannya pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang tidak melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik.

Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk menilai atau mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan belanja dapat dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah daripada anggaran belanja. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa: analisis varians belanja, merupakan analisis terhadap perbedaan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja; analisis pertumbuhan belanja, dimana analisis ini merupakan kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu; analisis keserasian belanja, dimana analisis ini bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja dan analisis efisiensi belanja, yang merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

Dengan menggunakan analisis belanja yang telah disebutkan, maka kita bisa mengetahui bagaimanakah kinerja anggaran belanja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang nantinya. Sebab, masyarakat pada umumnya belum mengetahui bagaimana kinerja aparat pemerintah kabupaten kupang terkhusus pada belanja daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat dan pemerintahan kabupaten untuk evaluasi dan masukan kedepan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Belanja Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kinerja belanja daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang Tahun 2018-2022.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian Untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah.
2. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang mengenai kinerja keuangannya, sehingga

dapat digunakan untuk perbaikan kondisi kesehatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang.

3. Bagi peneliti Penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai kinerja keuangan perusahaan dan berguna untuk melatih diri dalam menganalisa suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam penulisan skripsi